

# Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah Dasar Negeri 2 Badiaa

**Suhendro Gusli**

Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Muslim Buton

e-mail: [suhendrogusli@gmail.com](mailto:suhendrogusli@gmail.com)

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskusikan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di kelas IV SDN 2 Badiaa. Sekolah berperan sebagai lembaga pendidikan yang membimbing murid melalui arahan guru. Dengan adanya mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di tingkat Sekolah Dasar, diharapkan dapat membentuk karakter siswa dan membantu mereka memahami serta menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang baik, cerdas, terampil, dan bertanggung jawab. Dengan karakter yang terbentuk, diharapkan siswa dapat mengatasi berbagai masalah yang dihadapi. Meski demikian, masih ada sejumlah masalah dalam pembelajaran PKn di Sekolah Dasar yang perlu segera diperbaiki.

**Kata kunci:** *Pembelajaran PKn, Karakter Siswa, Masalah Pembelajaran*

## Abstract

This research aims to discuss Citizenship Education learning in class IV SDN 2 Badiaa. Schools act as educational institutions that guide students through teacher direction. With the Citizenship Education subject at elementary school level, it is hoped that it can shape students' character and help them understand and carry out their rights and obligations as good, intelligent, skilled and responsible citizens. With the character formed, it is hoped that students can overcome the various problems they face. However, there are still a number of problems in Civics learning in elementary schools that need to be corrected immediately.

**Keywords :** *Civics Learning, Student Character, Learning Problems*

## PENDAHULUAN

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di sekolah dasar memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter dan pemahaman siswa terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Guru memiliki tanggung jawab besar dalam mengembangkan nilai-nilai sikap dan moral pada siswa, yang merupakan landasan penting dalam pembentukan pribadi yang cerdas, terampil, dan berkarakter.

PKn merupakan mata pelajaran yang wajib bagi semua peserta didik di berbagai jalur dan jenjang pendidikan formal sesuai dengan Undang-Undang. Tujuan utama dari PKn adalah membentuk siswa menjadi warga masyarakat, bangsa, dan negara yang dapat diandalkan dalam mencapai tujuan bersama. PKn juga memiliki peran strategis dalam membentuk siswa menjadi individu yang demokratis dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari.

Minat belajar siswa terhadap PKn perlu diperhatikan karena minat ini merupakan faktor penunjang keberhasilan proses belajar. Selain itu, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa PKn bertujuan untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan dan kemampuan dasar mengenai hubungan antara warga negara dan negara serta Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN), sehingga mereka menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara.

Setiap individu, termasuk siswa di sekolah, memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan dengan baik sesuai dengan konsep keselarasan, keserasian, dan keseimbangan. Melalui PKn, siswa dapat memahami hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara Indonesia.

Diharapkan bahwa melalui PKn, peserta didik akan menjadi warga negara yang memiliki komitmen kuat untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, PKn memiliki peran yang sangat penting dalam mempersiapkan siswa untuk menjadi warga negara yang tangguh dan berkarakter dalam membangun negara.

### **Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan**

Sebagaimana diketahui, setiap bangsa memiliki sejarah perjuangan dari para pendahulu yang membawa banyak nilai nasionalisme, patriotisme, dan nilai-nilai lainnya yang melekat erat pada identitas warga negara. Namun, seiring dengan kemajuan zaman dan teknologi yang cepat, nilai-nilai tersebut cenderung memudar dari kesadaran individu dalam suatu masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pembelajaran yang mempertahankan dan menyatukan nilai-nilai tersebut dalam diri setiap warga negara, agar mereka memahami hak dan kewajiban mereka dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pendidikan kewarganegaraan merupakan upaya untuk mengingatkan pentingnya nilai-nilai hak dan kewajiban sebagai warga negara, sehingga setiap tindakan yang dilakukan sejalan dengan tujuan dan cita-cita bangsa, serta tidak menyimpang dari harapan yang ada. Pendidikan ini ditekankan sejak usia dini dan dilakukan di semua tingkat pendidikan, mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi, guna menciptakan generasi penerus yang kompeten dan siap mengemban tanggung jawab kehidupan berbangsa dan bernegara.

Menurut Soemantri (2001:154), pendidikan kewarganegaraan adalah usaha untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar kepada siswa mengenai hubungan antara warga negara dengan negara, serta pendidikan awal dalam mempertahankan negara sesuai dengan amanat UUD 1945 dan Pancasila. Tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah mempersiapkan warga masyarakat agar berpikir kritis dan bertindak demokratis, dengan memahami bahwa demokrasi adalah bentuk kehidupan masyarakat yang paling melindungi hak-hak mereka (Saidurrahman, 2018).

Aziz Wahab mengatakan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan media untuk membangun kesadaran, kecerdasan, dan tanggung jawab warga negara secara

sadar. Program PKn mencakup konsep-konsep ketatanegaraan, politik, hukum negara, dan teori umum lain yang sesuai dengan tujuan tersebut. PKn juga merupakan rangkaian proses untuk mengarahkan peserta didik agar bertanggung jawab dan aktif dalam masyarakat sesuai dengan Pancasila dan UUD NKRI 1945 (Madiung, 2018).

### **Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan**

Pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar bertujuan untuk mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai luhur dan moral yang tertanam dalam budaya bangsa, sehingga menjadi bagian dari identitas yang tercermin dalam perilaku sehari-hari. Melalui pendidikan ini, peserta didik diberikan pemahaman dan keterampilan untuk melaksanakan hak-hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

Berdasarkan UU Sisdiknas No.20 Tahun 2003 Bab 1 Pasal 1, pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk menciptakan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik dapat mengembangkan potensi diri mereka, termasuk aspek spiritual, kepribadian, kecerdasan, dan keterampilan yang diperlukan untuk kepentingan individu, masyarakat, bangsa, dan negara. Pendapat Carter v. Good (1997) menyatakan bahwa pendidikan adalah proses pengembangan kemampuan seseorang dalam bentuk sikap dan perilaku yang berlaku dalam masyarakatnya. Dengan demikian, pendidikan memiliki tujuan untuk membentuk kemampuan individu sehingga berguna bagi kehidupan mereka sebagai individu, warga negara, dan anggota masyarakat.

### **Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan**

Menurut Depdiknas (2006:49), tujuan pembelajaran PKn adalah untuk memberikan kompetensi sebagai berikut:

1. Berpikir kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu Kewarganegaraan.
2. Berpartisipasi secara cerdas dan tanggung jawab, serta bertindak secara sadar dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
3. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat di Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lain.
4. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam peraturan dunia secara langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Serta secara umum, menurut Maftuh dan Sapriya (2005:30), Tujuan negara mengembangkan Pendidikan Kewarganegaraan agar setiap warga negara menjadi warga negara yang baik (to be good citizens), yakni warga negara yang memiliki kecerdasan (civics intelligence) baik intelektual, emosional, sosial, maupun spiritual yang memiliki rasa bangga dan tanggung jawab (civics responsibility), dan mampu berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Setelah menelaah pemahaman dari tujuan Pendidikan Kewarganegaraan, maka dapat di simpulkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan berorientasi pada penanaman konsep Kenegaraan dan juga bersifat implementatif dalam kehidupan sehari-hari.

Sedangkan menurut Djahiri (1994/1995:10) Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan yang adalah sebagai berikut:

Secara umum. Tujuan PKn mendukung keberhasilan pencapaian Pendidikan Nasional, yaitu: “Mencerdaskan kehidupan bangsa yang mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya. Yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti yang luhur, memiliki kemampuan pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan”.

Secara khusus. Tujuan PKn yaitu membina moral yang diharapkan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu perilaku yang memancarkan iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam masyarakat yang terdiri dari berbagai golongan agama, perilaku yang bersifat kemanusiaan yang adil dan beradab, perilaku yang mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan perseorangan dan golongan sehingga perbedaan pemikiran pendapat ataupun kepentingan diatasi melalui musyawarah mufakat, serta perilaku yang mendukung upaya untuk mewujudkan keadilan sosial seluruh rakyat Indonesia.

Sedangkan menurut Sapriya (2001), tujuan pendidikan Kewarganegaraan adalah dengan partisipasi yang penuh nalar dan tanggung jawab dalam kehidupan politik dari warga negara yang taat kepada nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar demokrasi konstitusional Indonesia. Partisipasi warga negara yang efektif dan penuh tanggung jawab memerlukan penguasaan seperangkat ilmu pengetahuan dan keterampilan intelektual serta keterampilan untuk berperan serta. Partisipasi yang efektif dan bertanggung jawab itu pun ditingkatkan lebih lanjut melalui pengembangan disposisi atau watak-watak tertentu yang meningkatkan kemampuan individu berperan serta dalam proses politik dan mendukung berfungsinya sistem politik yang sehat serta perbaikan masyarakat.

### **Fungsi Pendidikan Kewarganegaraan**

Mata pelajaran Pendidikan kewarganegaraan (PKn) mempunyai fungsi sebagai sarana untuk membentuk peserta didik menjadi warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya, berkomitmen setia kepada bangsa dan negara Indonesia dengan merefleksikan diri sebagai warga negara yang cerdas, terampil dan berkarakter sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945. Suplemen pengembangan PKn SD ini dimaksudkan untuk melengkapi bahan ajar cetak yang sudah ada. Di dalam suplemen ini dikembangkan model-model, strategi, metode-metode dan pendekatan-pendekatan dalam rangka pembelajaran PKn SD yang akan membantu guru dalam menuangkan kreativitasnya di depan kelas sebagai fasilitator. Pengembangan suplemen PKn SD ini didasarkan atas prinsip-prinsip Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan (PAIKEM). Prinsip-prinsip ini diharapkan dapat mempermudah daya serap materi mata pelajaran PKn terutama dalam penilaian ranah afektif, kognitif dan psikomotor secara simultan, terutama peserta didik pada kelas rendah yang baru belajar membaca dan menulis. Pada kelas tinggi kreativitas dalam pembelajaran lebih ditingkatkan lagi. Namun konsekuensinya guru sebagai motivator dan fasilitator harus kreatif, inisiatif, dan konsen terhadap peserta didik. Tanpa hal ini pembelajaran PKn yang kita inginkan tidak akan tercapai secara optimal.

Sedangkan menurut Mubarakah (2012) Fungsi pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan adalah : Membantu generasi muda memperoleh pemahaman cita-cita

nasional atau tujuan negara Dapat mengambil keputusan-keputusan yang bertanggung jawab dalam menyelesaikan masalah pribadi, masyarakat dan negara .

Dapat mengapresikan cita-cita nasional dan dapat membuat keputusan keputusan yang cerdas Wahana untuk membentuk warga negara yang cerdas, terampil dan berkarakter yang setia kepada bangsa dan negara Indonesia dengan merefleksikan dirinya dalam kebiasaan berpikir dan bertindak sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD NKRI 1945.

Tujuan utama pendidikan kewarganegaraan adalah untuk menumbuhkan wawasan dan kesadaran bernegara, sikap serta perilaku yang cinta tanah air dan bersendikan kebudayaan bangsa, wawasan nusantara, serta ketahanan nasional dalam diri para calon-calon penerus bangsa yang sedang dan mengkaji dan akan menguasai imu pengetahuan dan teknologi serta seni. Selain itu juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia indonesia yang berbudi luhur, berkepribadian, mandiri, maju, tangguh, profesional, bertanggung jawab, dan produktif serta sehat jasmani dan rohani.

### **Permasalahan & Solusi Pendidikan Kewarganegaraan Di Sekolah Dasar**

Berikut adalah beberapa permasalahan dan solusi terkait Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah Dasar menurut Hendrizal (2017):

Permasalahan yang dihadapi:

1. Minat siswa terhadap Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) cenderung rendah dibandingkan dengan mata pelajaran lain seperti Matematika, IPA, dan Bahasa Indonesia.
2. Kurangnya perhatian terhadap PKn, mungkin disebabkan oleh ketiadaan ujian nasional untuk mata pelajaran ini di tingkat Sekolah Dasar.
3. Terdapat pandangan meremehkan terhadap PKn, yang berdampak pada pencapaian pembelajaran PKn yang kurang optimal.
4. Kurangnya keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran PKn.

Solusi yang diusulkan:

1. Mengintrospeksi diri sebagai pendidik, untuk memastikan apakah metode pengajaran yang digunakan telah efektif dan mampu membangkitkan minat siswa terhadap PKn.
2. Mengatasi kompleksitas masalah dengan menyusun kurikulum yang lebih sesuai dengan kemampuan siswa Sekolah Dasar, dengan fokus pada pemahaman esensi dan kata kunci dalam Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD).
3. Menyusun rencana pembelajaran (RPP) yang matang dan berbasis pendekatan konstruktivisme, sehingga memberikan kesempatan kepada siswa untuk menggali potensi diri mereka dan belajar berdasarkan konteks kehidupan nyata.
4. Mengubah pendekatan evaluasi pembelajaran PKn menjadi lebih holistik, mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik, serta menilai kebermaknaan pembelajaran bagi kehidupan siswa.

### **Pelaksanaan Pembelajaran Tematik.**

Dalam implementasi pembelajaran tematik, beberapa langkah yang penting untuk dilakukan mencakup:

1. Tahap Perencanaan:
  - Pemetaan kompetensi dasar.
  - Penentuan tema pembelajaran.

- Pembuatan jaring-jaring tema.
  - Pengembangan silabus.
  - Penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran.
2. Tahap Pelaksanaan Pembelajaran Tematik:
    - Penggunaan berbagai model dan teknik pembelajaran.
    - Penentuan serta pemanfaatan media pembelajaran.
  3. Tahap Penilaian:
    - Penilaian ketercapaian kompetensi dasar dan indikator pada setiap mata pelajaran yang terkait dengan tema.
    - Penilaian dilakukan secara terpisah-pisah sesuai dengan kompetensi dasar dan indikator pada masing-masing mata pelajaran.

Alur dalam mengembangkan rencana pelaksanaan pembelajaran tematik mencakup enam tahap menurut Rusman (2015), yaitu:

1. Menetapkan mata pelajaran yang akan dipadukan.
2. Memahami kompetensi dasar dan indikator dari mata pelajaran yang akan dipadukan.
3. Memilih dan menetapkan tema yang menjadi penyatuan.
4. Membuat matriks atau bagan hubungan antara kompetensi dasar dan tema penyatuan.
5. Menyusun silabus pembelajaran tematik.
6. Penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran tematik.

Teori Piaget (dalam BPSDMPK, 2012) menyatakan bahwa perkembangan intelektual anak meliputi empat tahap, yaitu sensori-motor, pra-operasional, operasional konkret, dan formal. Oleh karena itu, dalam praktiknya, guru perlu memperhatikan ciri-ciri perkembangan ini secara holistik pada anak, karena tahap perkembangan tersebut sangat berpengaruh terhadap aspek-aspek perkembangan lainnya.

## **METODE**

Untuk mendapatkan pemahaman tentang metode pembelajaran yang dilakukan oleh guru Sekolah Dasar, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode observasi dan wawancara. Wawancara merupakan teknik komunikasi antara dua pihak atau lebih, di mana pewawancara berinteraksi dengan narasumber untuk mengumpulkan informasi yang relevan (Malora, 2013). Pendekatan ini dipilih karena peneliti ingin memperoleh wawasan langsung dari para guru Sekolah Dasar tentang strategi pengajaran yang mereka terapkan.

Narasumber dalam penelitian ini adalah guru wali kelas di kelas IV di SD Negeri 2 Badaia. Melalui observasi dan wawancara, peneliti bertujuan untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang pendekatan, teknik, dan strategi pembelajaran yang diterapkan oleh para guru tersebut. Metode observasi memungkinkan peneliti untuk mengamati langsung kegiatan pembelajaran di kelas, termasuk interaksi antara guru dan siswa, serta berbagai metode yang digunakan dalam proses pengajaran. Sementara itu, wawancara memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi pemikiran, pendapat, dan pengalaman guru terkait dengan strategi pembelajaran yang mereka terapkan.

Dengan menggunakan kombinasi metode observasi dan wawancara, diharapkan peneliti dapat mengumpulkan data yang komprehensif dan mendalam tentang praktik pembelajaran di Sekolah Dasar. Hal ini akan membantu dalam mengidentifikasi pola-pola umum dalam metode pengajaran yang digunakan, serta faktor-faktor yang memengaruhi pilihan metode tersebut.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pernyataan dari guru wali kelas IV SD Negeri 2 Badiaa mengenai pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dalam buku Tematik adalah sebagai berikut: PKn telah dimasukkan ke dalam pembelajaran Tematik, yang merupakan pembelajaran terpadu yang mengaitkan beberapa mata pelajaran. Kelebihan pembelajaran Tematik adalah pusat perhatiannya lebih kepada siswa, sehingga siswa menjadi lebih aktif dan mendapatkan pengalaman yang bermakna. Pembelajaran Tematik juga mengadopsi prinsip belajar sambil bermain, menjadikan suasana belajar lebih menyenangkan. Dari pembelajaran Tematik ini, guru dapat mengetahui hasil pembelajaran sesuai minat dan bakat siswa. Namun, kekurangan dari pembelajaran Tematik adalah pemisahan mata pelajaran yang tidak jelas.

Fungsi dari pembelajaran PKn adalah membantu siswa memahami hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara, membentuk karakter yang lebih baik dan bertanggung jawab, serta menumbuhkan rasa nasionalisme terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Tujuan pembelajaran PKn adalah menjadi sarana bagi siswa untuk lebih mengenal NKRI, membentuk pribadi sesuai dengan budaya NKRI, dan membentuk generasi yang mencintai tanah air serta berperan dalam memajukan Republik Indonesia. Kendala dalam pembelajaran PKn meliputi kesulitan siswa dalam memahami materi yang terlalu berat, kurangnya keterlibatan siswa dalam proses belajar mengajar, dan kekurangan peralatan untuk mendukung pembelajaran.

Pendidikan kewarganegaraan bertujuan agar siswa dapat berpikir secara kritis, kreatif, cerdas, dan bertanggung jawab. Pendidikan kewarganegaraan tidak hanya menekankan kemampuan intelektual tetapi juga moralitas peserta didik. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan memiliki peran penting dalam membentuk kepribadian siswa SD/MI, karena mempelajari bagaimana menjadi warga negara yang baik dan benar. PPKN adalah mata pelajaran yang wajib dipelajari dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi.

PKn mengajarkan cara menciptakan kerukunan di lingkungan sekolah. Sesuai dengan tujuannya, PKn bertujuan agar siswa memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, serta membentuk kepribadian yang sesuai dengan nilai-nilai tersebut. Pendidikan kewarganegaraan adalah upaya untuk membentuk watak bangsa Indonesia dan kepribadian manusia Indonesia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. PKn memiliki dimensi sebagai pendidikan nilai, sosial, politik, dan moral. Pendidikan karakter diintegrasikan dalam mata pelajaran untuk melatih, menanamkan, membiasakan, dan menguatkan karakter siswa sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam PKn.

Penerapan pendekatan saintifik dalam pembelajaran PKn menunjukkan dampak positif pada keterampilan kewarganegaraan siswa, terutama dalam aspek menjawab, bertanya, berdiskusi, dan berpartisipasi aktif. Integrasi nilai-nilai kehidupan dalam pendidikan

konsumen adalah kebutuhan yang penting bagi peserta didik. Beberapa nilai-nilai tersebut telah diintegrasikan ke dalam mata pelajaran, terutama PKn, IPS bidang ekonomi, dan PKK.

## SIMPULAN

Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter generasi penerus yang mencintai tanah air serta sesuai dengan identitas bangsa. Oleh karena itu, perlu adanya perhatian yang lebih serius terhadap mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan agar proses pembelajaran dapat berjalan secara efektif dan efisien. Dengan demikian, diharapkan dapat menciptakan warga masyarakat yang memiliki rasa cinta terhadap Tanah Air dan mampu berperan aktif dalam membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam konteks pelaksanaan pembelajaran tematik sesuai dengan Kurikulum 2013 di SD Negeri 2 Badiiaa, secara umum kegiatan tersebut berlangsung dengan baik dan lancar. Meskipun pada awalnya, para guru di sekolah tersebut mungkin belum begitu memahami sepenuhnya konsep dan implementasi pembelajaran tematik dalam kurikulum 2013. Namun demikian, hal ini tidak membuat mereka putus asa. Mereka tetap berusaha untuk memahami, mempelajari, dan mencoba menerapkan proses pembelajaran tematik dengan sebaik mungkin.

Dengan adanya upaya dari para guru untuk terus belajar dan mengembangkan diri dalam pelaksanaan pembelajaran tematik, diharapkan kualitas pendidikan di SD Negeri 2 Badiiaa dapat terus meningkat. Hal ini juga akan membantu dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang memungkinkan para siswa untuk lebih memahami nilai-nilai kewarganegaraan serta menjadi bagian yang aktif dalam pembangunan bangsa.

Dengan demikian, penting bagi pihak terkait, baik itu pemerintah, lembaga pendidikan, maupun masyarakat, untuk memberikan dukungan dan perhatian yang lebih terhadap pelaksanaan Pendidikan Kewarganegaraan serta pengembangan pembelajaran tematik di sekolah-sekolah. Hal ini menjadi investasi penting bagi masa depan bangsa Indonesia dalam menciptakan generasi penerus yang memiliki kesadaran dan tanggung jawab sebagai warga negara yang baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkarim, A. (2006). *Pendidikan Kewarganegaraan Membangun Warga Negara Yang Demokratis*. Bandung: Grafindo Media Pratama.
- Dewi, N. P. C. P. (2020). *Buku Ajar Mata Pelajaran Sekolah Dasar PKN Dan Pancasila* (1st ed.; I. M. Sedana, ed.). Bali: Nilacakra.
- Hendrizar. (2017). *PKn SD, Masalah Dan Solusinya*. Retrieved from <https://bunghatta.ac.id/artikel-325-pkn-sd-masalah-dan-solusinya.html>
- Madiong, B. (2018). *Pendidikan Kewarganegaraan Civic Education*. Makasar: Celebes Media Perkasa.
- Malora, S. (2013). *Artikel Wawancara*. Retrieved from [https://www.google.com/amp/s/www.kompasiana.com/amp/s\\_malora/artikel-wawancara\\_552a26256ea8343b1d552d28](https://www.google.com/amp/s/www.kompasiana.com/amp/s_malora/artikel-wawancara_552a26256ea8343b1d552d28)
- Mubarokah, A. (2012). *Hakikat Dan Fungsi Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan*.

- Rahayu, M. (2007). *Pendidikan Kewarganegaraan Perjuangan Menghidupi Jati Diri Bangsa*. Depok: PT Grasindo.
- Saidurrahman. (2018). *Pendidikan Kewarganegaraan NKRI Harga Mati*. Jakarta: KENCANA.
- Susanto, H. (2013). *Pembelajaran PKn Di SD*. 1. Retrieved from <https://www.google.com/amp/s/bagawanabiyasa.wordpress.com/2013/05/16/pembelajaran-pkn-di-sd/amp/>
- Tirtoni, F. (2016). *Pembelajaran PKn Di Sekolah Dasar*. Yogyakarta: CV. Buku Baik Yogyakarta.
- Sri Wening, Pembentukan Karakter Bangsa Melalui Pendidikan Nilai. *Jurnal Pendidikan Karakter*. No 1, 2012, hlm. 59-60